



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR ALIM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **720433**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1121 m2/280 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, LAINNYA Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/64 m2 di KAB / KOTA GOWA, LAINNYA Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 468.900.000

1. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR CBR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR CBR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 318.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 380.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 100.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.500.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.562.400.000
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.262.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.